

**HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGARA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2005-2006**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

IRADAT GUNAWAN

20030520050

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

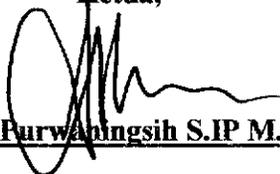
Telah dipertahankan dan disahkan didepan Tim Penguji
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 31 Januari 2007

Tempat : Ruang Referensi

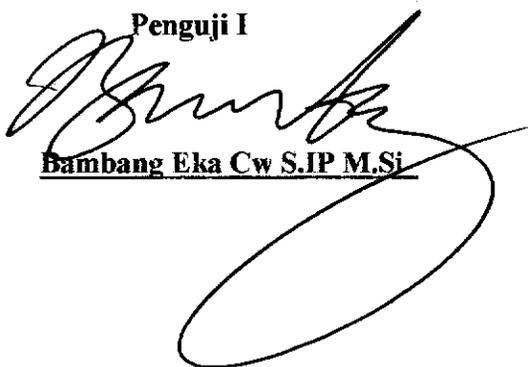
SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua,



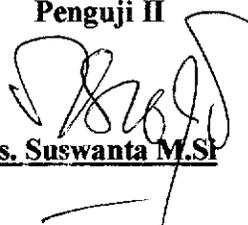
Titin Purwaningsih S.IP M.Si

Penguji I



Bambang Eka Cw S.IP M.Si

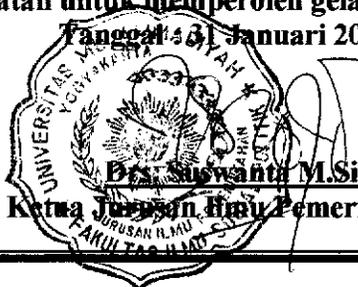
Penguji II



Drs. Suswanta M.Si

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu
Persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1)

Tanggal 31 Januari 2007



Drs. Suswanta M.Si
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri. Dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis oleh orang lain, atau telah di gunakan sebagai pernyataan studi pada perguruan tinggi lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil dari buku literature dan hasil dari penelitian kiripsi di lapangan, sebagaimana yang tercantum dalam daftar pustaka. Selanjutnya apabila di kemudian hari terbukti terdapat duplikasi dan ada pihak lain yang merasa di rugikan atau menuntut, maka saya akan mempertanggung jawabkannya dan menerima konsekwensinya yang menyertainya baik secara akademis maupun hukum. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Januari 2007

Yang membuat pernyataan

Iradat Gunawan

No .Mhs: 20030520050

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul HUBUNGAN KEWENAGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU PADA SISTIM OTONOMI DAERAH TAHUN 2005-2006 Study kasus Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Bupati Kabupaten Dompus.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi ketentuan akademik guna memperoleh gelar kesarjanaan di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Segala usaha yang dilakukan oleh penulis dalam mencari kelengkapan dan informasi tidak terlepas dari bantuan, dukangan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga atas kehendaknyalah semua ini dapat terwujud.
2. Junjungan nabi besarku Muhammad SAW yang telah memberikanku tuntunan dalam menjalani hidup ini untuk mengerti arti kehidupan dan kemanusiaanku.

3. Bp. Dr, H, Khoiruddin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Bp. Bambang Eka Cahya W, S.Ip, M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bp. Drs Suswanta, M.Si. selaku ketua jurusan Ilmu pemerintahan.
6. Ibu. Titin Purwaningsih, S.Ip, M.Si. selaku sekretaris jurusan Ilmu pemerintahan dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, kesabaran dan bimbingan serta dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bp. Drs Ulung pribadi, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik, Jurusan Ilmu pemerintahan, dan seluruh staf karyawan/tata usaha FISIPOL.
9. Kedua orang tuaku yang selalu memberikanku dukungan, nasehat, do,a, dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini.
10. Teman-temanku di jurusana Ilmu pemerintahan angkatan 2003, kelas B
11. Teman-teman KKN ku, di kel. Segoroyoso, kec Pleret, Kab. Bantul, yogyakarta. Gigih S, M. Faujan N, Andriana S, Arsil Nova T.N, Suwartono, Afnan N, Fangky, Leni Rina K, Andriana W.
12. Teman-teman kostku, Aconk, Coky, Singgi'i, Doel, Jambrong, Imron, widi.
13. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barata dan pemerintah Kabupaten Dompu terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak, khususnya pihak yang memerlukan, terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penyusun menyadari bahwa tidak ada suatu karya yang mencapai kesempurnaan, beberapa kekurangan mungkin terdapat. Untuk karena itu penyusun mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Yogyakarta, Januari 2007

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
SINOPSIS	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Dasar Teori	7
a. Desentralisasi	8
b. Pergeseran Aturan Perundangandalam Hubungan Provinsi dan Kabupaten	11
c. Pemerintah Daerah	13
d. Otonomi Daerah	17
e. Hubungan Kewenangan	23
1. Kewenangan Pemerintah Pusat.....	26
2. Kewenangan Pemerintah Provinsi	30
3. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota	39
E. Definisi Konsepsional	46
F. Definisi Operasional	47
G. Metode Penelitian Sosial.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Jenis Data	48
3. Teknik Pengumpulan Data	48
4. Unit Analisa Data.....	49
5. Teknik Analisa Data.....	49
H. Sistematika Penulisan.....	50

BAB II DESKRIPSI WILAYAH

KONDISI UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	52
A. Keadaan Geografis	52
1. Letak dan Luas Wilayah	52
2. Kondisi Geografis	52
3. Luas Wilayah	53
4. Keadaan Demografi	54
a. Jumlah Penduduk	54
b. Keadaan Penduduk	54
1. Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	54
2. Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin	55
3. Berdasarkan Agama	56
4. Berdasarkan Status Pendidikan	57
5. Sarana dan Prasarana	58
a. Sarana Pendidikan	58
b. Sarana Kesehatan	59
c. Sarana Keagamaan	59
6. Sarana Perhubungan	60
7. Sarana Pos dan Telekomunikasi	61
8. Struktur Organisasi	62
 KONDISI UMUM DAERAH KABUPATEN DOMPU	 70
A. Kondisi Geografis	70
1. Letak Kabupaten Dompu	70
2. Pembagian Wilayah	71
3. Luas Wilayah	71
4. Keadaan Alam	72
a. Tanah Aluvia	73
b. Tanah Regosol	74
c. Tanah Grumusol	74
d. Tanah Kompleks	74
5. Keadaan Iklim	75
6. Keadaan Demografi	76
a. Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan	77
b. Penduduk Menurut Kecamatan dan Laju Pertumbuhan Penduduk	78
c. Penduduk Menurut Jenis Kelamin	79
d. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	80
7. Sarana dan Prasarana	80
a. Sarana Keagamaan	80

b. Sarana Kesehatan	81
c. Sarana Pendidikan	82
d. Sarana Jalan.....	83
e. Sarana Pos dan Giro	84
8. Struktur Organisasi.....	85

BAB III

HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

A. Kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	91
B. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	103
C. Pemberian Kewenangan Kepada Kabupaten/Kota Berdasarkan Aspek Eksternalisasi, Akuntabilitas dan Efisiensi	144

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran.....	160

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table 1.1	Perbandingan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.....	43
Tabel.2.1.	Ketinggian Wilayah Terdiri Dari Permukaan Laut Berdasarkan Kabupaten/Kota Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005	53
Tabel.2.2	Luas Wilayah Daratan dan Perairan Laut Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005	54
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2005.....	55
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Luas Wilayah Per Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Propinsi Nusa Tenggara Barat.....	56
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Propinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Agama tahun 2005	57
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin Propinsi Nusa Tenggara Barat 2005.....	57
Tabel 2.7	Jumlah Sarana Pendidikan di Propinsi Nusa Tenggara Barat	58
Tabel 2.8	Jumlah Rumah sakit Propinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/kota.....	59
Tabel 2.9	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota 2005	60
Tabel 2.10	Panjang Jalan Menurut Status Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005....	61
Tabel 2.1.1	Jumlah Kantor Pos di Propinsi Nusa Tenggara Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pelayanan Pos 2005.....	62
Tabel 2.1	Banyaknya Desa, Kelurahan, Dusun, Lingkungan dan Rukun Tetangga menurut Kecamatan di Kabupaten Dompu 2005	71
Tabel 2.2	Luas Kabupaten Doinpu Menurut Kecamatan 2005	72
Tabel 2.3	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Per Km ² Menurut Kecamatan	77

Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kematan dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Dompu tahun 2005	78
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Dompu Tahun 2005.....	79
Tabel 2.6	Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	80
Tabel 2.7	Banyak Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Dompu	81
Tabel 2.8	Jumlah Unit Pelayanan Kesehatan	82
Tabel 2.9	Jumlah Sekolah Menurut Jenis Sekolah di Kabupaten Dompu Tahun 2005.....	83
Tabel 2.10	Panjang Jalan Menurut Status, Jenis Permukaan, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Dompu	84
Tabel 2.11	Jumlah Surat Pos dan Paket Pos yang Dikirim dan Diterima Kantor Pos di Kabupaten Dompu Tahun 2005	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Titik Berat Kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah..	29
Gambar 1.2 Struktur Pemerintahan Provinsi Menurut UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32/2004	32
Gambar 1.3 Kedudukan pemerintah provinsi	32
Gambar 1.4 Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten /Kota.....	40

SINOPSIS

Skripsi ini mengangkat judul "hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Kabupaten Dompu pada sistim otonomi daerah tahun 2005-2006. Dengan pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/ kota maka terjadi perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pemerintah daerah yang sangat menonjol adalah hubungan kewenangan. Permasalahan yang terjadi Propinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Dompu adalah permasalahan yang menyangkut kewenangan di bidang pertanahan. Masalah pertanahan di Kabupaten Dompu adalah sengketa tanah antar penduduk, dan masyarakat dengan pemerintah saling memperebutkan hak atas tanah. Dimana pemerintah Kabupaten Dompu memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang dan pertauran yang berlaku untuk mengatur dan mengurus permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dompu dan sejauhmana pemerintah kabupaten dompu melaksanakan dan mengimplementasikan kewenangan yang telah diberikan.

Sementara metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dimana kajian penelitian ini yakni pengumpulan bahan-bahan berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, buku-buku referensi dan bahan kepustakaan lainnya, dan metode penelitian lapangan yakni dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk melakukan pengambilan data terhadap subjek dan objek penelitian di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kantor Bupati Kabupaten Dompu dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini kasubag kelembagaan Kabupaten Dompu, bagian otonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan subag kajian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hubungan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten telah berjalan sesuai peraturan yang berlaku, pemerintah provinsi melaksanakan tugas pembinaan sementara pemerintah kabupaten melaksanakan pembangunan, dengan melihat kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten sudah jelas mana kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi dan mana kewenangan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan kewenangan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota tersebut sudah di atur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah di bagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah.

Dalam pelaksanaan kewenangan secara keseluruhan baik pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kabupaten sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku namun hanya saja masih ada kendala-kendala yang di hadapi baik oleh pemerintah Provinsi maupun oleh pemerintah Kabupaten serta pemberian kewenangan kepada pemerintah kabupaten berdasarkan aspek eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dimana pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dapat menentukan, bertanggungjawab luas dan besar dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintah serta melihat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan kewenangan.